BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini dalam kehidupan manusia dapat ditemukan berbagai macam masalah yang sifatnya global seperti masalah ekonomi, keamanan, lingkungan hidup dan juga kesehatan. Masalah kesehatan dapat dikategorikan sebagai salah satu pembahasan utama dalam agenda Internasional, khususnya dalam membahas masalah epidemi HIV/AIDS dan penyebarannya yang sangat cepat di seluruh dunia.

HIV singkatan dari *Human Immunodeficiency Virus* adalah penyebab virus AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*), yang mana AIDS adalah sindroma menurunkan kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV, merupakan penyakit yang paling menakutkan. Pemerintah kehilangan generasi muda produktif karena korbannya hampir semua berumur 20-45 tahun. Walaupun kasus besar terjadi dengan dahsyatnya di Thailand, India, Afrika namun pada dekade berikutnya gelombang penyebaran HIV/AIDS ini sudah sampai di Asia. Kamboja, Vietnam, Burma, Indonesia, Bangladesh adalah Negara yang rawan terhadap penderita dan kematian penyakit itu. Di Asia, penderita HIV/AIDS lebih banyak ditemukan di kalangan pekerja seks, kaum homoseksual dan pemakai narkoba suntik, namun *United Nations Joint Program on HIV/AIDS* (UNAIDS) sebagai badan PBB yang menangani permasalahan HIV/AIDS di seluruh dunia melihat virus ini bisa menjangkiti masyarakat biasa juga nantinya.

Sejumlah penelitian menegaskan bahwa perkembangan HIV/AIDS sangat tinggi di negara berkembang dibanding negara maju. Ini terjadi karena masyarakat negara berkembang terus-menerus melakukan penyangkalan bahwa HIV/AIDS tumbuh subur dikawasannya. Karena tanggapan atas informasi ini akan mencoreng moral masyarakat setempat dan memunculkan kekhawatiran tersebut akan mempengaruhi berbagai bidang, diantaranya terhadap bidang ekonomi, dikarenakan para pengidap HIV/AIDS rata-rata memakan usia muda dan tentunya akan mengganggu perekonomian suatu negara, yang akan banyak mengeluarkan biaya hanya untuk merawat para pengidap HIV/AIDS ini.

Epidemi HIV/AIDS ini pertama kali ditemukan di Copenhagen pada tahun 1979 dan disusul dengan beberapa kasus serupa di San Fransisco, Los Angeles dan New York tahun 1981. Penyebaran virus HIV/AIDS sejak pertama ditemukan pada dekade tahun 1980-an, mengalami lima gelombang. *Pertama*, menimpa kaum homoseksual, *kedua*, kaum penjaja seks komersial, *ketiga*, kaum heteroseksual, *keempat*, bayi yang tertular dari ibunya yang mengidap HIV/AIDS dan *kelima*, pengguna narkoba suntik. Kelima gelombang ini telah menimbulkan ketakutan masyarakat terhadap pengidap HIV/AIDS, yang didorong rasa ketakutan yang berlebihan dan prasangka buruk. Namun, belakangan masyarakat menyadari siapa pun bisa terinfeksi HIV dan mengidap AIDS. Dan tentunya penyebaran virus HIV/AIDS itu menyebar hingga menjadi isu global, termasuk di Indonesia, virus ini menjangkit hingga semua kalangan, yang dimana kasus HIV/AIDS di Indonesia pertama kali ditemukan pada seorang wisatawan berusia 44 tahun asal Belanda, Edward Hop, meninggal di Rumah Sakit Sanglah, Bali.

Kematian lelaki asing itu disebabkan AIDS. Hingga akhir 1987, ada enam orang yang di diagnosis HIV positif, dua di antara mereka mengidap AIDS.

Dalam penanggulangan masalah penyakit HIV/AIDS secara umum, Indonesia tertinggal dari negara-negara lain. Beberapa Organisasi Internasional saat ini sedang mencurahkan perhatian dalam mengatasi HIV/AIDS di Indonesia, namun penanganan masalah tersebut membutuhkan banyak sumber daya dan tindakan segera. Beberapa tahun belakangan, angka kasus HIV/AIDS meningkat tajam di seluruh Indonesia. Sejak 1985 sampai tahun 1996 kasus HIV/AIDS di Indonesia masih sangat jarang, hanya sebagian besar berasal dari kelompok homoseksual. Sejak pertengahan tahun 1999 mulai terlihat peningkatan tajam terutama akibat penularan melalui narkotika suntik. Hingga dengan Maret 2005 tercatat 6789 kasus HIV/AIDS, jumlah itu diperkirakan belum menunjukkan angka sebenarnya. Departemen Kesehatan Indonesia pada tahun 2002, memperkirakan jumlah penduduk Indonesia yang terinfeksi HIV/AIDS adalah antara 90 ribu sampai 130 ribu orang. Dan untuk tahun 2009, secara kumulatif jumlah kasus HIV/AIDS di Indonesia mencapai 17.699 kasus. (http://www.aidsindonesia.or.id/?page id=11, diakses pada tanggal 20 April 2010).

Data yang ada menunjukkan kesimpulan bahwa epidemi HIV/AIDS di Indonesia sudah berada dalam tahap lanjut. Infeksi HIV/AIDS juga telah mengenai semua golongan masyarakat umum. Jika pada awalnya, sebagian besar ODHA (orang yang hidup dengan HIV/AIDS) berasal dari kelompok homoseksual, maka kini penyebaran virus ini telah mengalami tahap pergeseran

dimana persentase penularan secara heterokseksual dan pengguna narkotika semakin meningkat.

Di Indonesia, proporsi penularan melalui penggunaan narkotika suntik telah meningkat dengan cepat dan drastis sejak tahun 1999, terutama di Jakarta dan kota-kota besar seperti Bali dan Jawa. Sampai dengan Desember 2004, proporsi penularan penggunaan narkotika suntikan di Jakarta mencapai 47,9% dari total kasus HIV/AIDS. Lebih dari 50% pengguna narkotika suntikan yang terinfeksi HIV/AIDS adalah pria. Sehingga di Jakarta, menunjukkan bahwa prevelansi HIV/AIDS meningkat tajam dari 15,8% pada tahun 1999 menjadi 44,1% pada tahun 2002. (http://www.aidsindonesia.or.id/?page, diakses pada tanggal 21 April 2010).

Kasus HIV/AIDS dan jumlah orang yang mati akibat HIV/AIDS terjadi di DKI Jakarta terus melonjak, menurut data Departemen Kesehatan, Desember 2006 tercatat 2565 kasus AIDS terjadi di DKI Jakarta. Padahal tiga bulan sebelumnya, jumlahnya hanya 2394 kasus dengan angka kematian sebanyak 409 orang. Dan menurut data Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, pengidap HIV/AIDS 2009 mencapai 439 orang. Untuk Jakarta Utara 44 orang, Jakarta Selatan 87 orang, Jakarta Barat 116 orang, Jakarta Timur 82 orang, serta Jakarta pusat ada 110 orang. (http://www.aidsindonesia.or.id/?p=687, diakses pada tanggal 21 April 2010).

Penambahan kasus HIV/AIDS di Jakarta paling banyak disumbangkan oleh pengguna jarum suntik secara bergantian dari pecandu narkotika dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang besar. Ini bisa dilihat dari data penderita AIDS

yang berasal dari jarum suntik sebanyak 2054 pada tahun 2008 (72,10%) dari seluruh kasus HIV/AIDS yang tercatat. (http://www.aidsindonesia.or.id/?page id=23, diakses pada tanggal 21 April 2010).

Fakta-fakta yang ditampilkan memperlihatkan betapa mengerikannya potensi ancaman yang ditimbulkan penyakit ini, maka pemerintah sendirian tidak akan sanggup untuk mengatasinya. Apalagi dengan banyaknya daerah yang harus diurusi di DKI Jakarta sebagai daerah yang memiliki kasus HIV/AIDS terbesar akan sangat memberikan pedoman bagi daerah lain di Indonesia untuk mengurangi penyebaran yang sangat cepat ini.

Karena banyaknya tugas pemerintah Indonesia dan tidak adanya jaminan akan masalah ini, peran aktor lain selain negara menjadi aktual. Masalah ini membuat pemerintah Indonesia khawatir dengan keberadaan virus tersebut. Sejalan dengan masalah yang dihadapi, pemerintah Indonesia telah melaksanakan strategi penanggulangan HIV/AIDS melalui dua periode yang dimuat dalam Strategi Nasional (STRANAS) Penanggulangan HIV/AIDS 1994-2003 dan tahun 2003-2007 yang dimana pemerintah Indonesia melaksanakan STRANAS Penanggulangan HIV/AIDS tersebut melalui KPA yang dibentuk oleh pemerintah pada tahun 1994 dan STRANAS merupakan respons yang sangat penting dalam menghadapi virus HIV/AIDS ini. Strategi Nasional HIV dan AIDS sendiri dilaksanakan sejalan dengan rencana pembangunan nasional. Pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, pelaksanaan STRANAS akan disesuaikan dengan rencana pembangunan daerah masing-masing.

Pelaksanaan STRANAS harus konsisten dengan tujuan-tujuan kebijakan yang ingin dicapai, serta ditujukan untuk merespon situasi dan kondisi lokal dan nasional HIV dan AIDS. STRANAS merupakan *living document* sehingga terbuka untuk perubahan atas dasar kebutuhan respons. (KPA, Strategi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS 2007-2010)

Dan upaya pemerintah Indonesia demi mensukseskan strategi tersebut mendapatkan bantuan yang salah satunya adalah dari *United Nations Joint Program on HIV/AIDS* (UNAIDS), yang merupakan organisasi internasional yang bertugas untuk menanggulangi atau menekan penyebaran virus HIV/AIDS di seluruh dunia. Organisasi ini mulai aktif beroperasi di Indonesia pada tahun 1996 dengan mempromosikan kerjasama dengan agen PBB lainnya, pemerintah, media massa dan aktor lainnya. UNAIDS membantu pencegahan epidemi yang lebih besar terutama di negara-negara berkembang. UNAIDS membantu pemerintah Indonesia berupa bantuan teknis dan dana. UNAIDS mensponsori berbagai tindakan advokasi di beberapa tempat di Jakarta untuk meningkatkan informasi dan layanan kesehatan di Jakarta. UNAIDS membantu Indonesia melalui Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dengan memberikan bantuan manajemen kepada KPA untuk pelaksanaan program nasional AIDS, bantuan manajemen salah satunya adalah bantuan penyusunan dan pelaksanaan program-program kerjasama yang dianggap mampu memberikan hasil yang lebih efektif dalam penanggulangan HIV/AIDS, baik program kerja jangka pendek, menengah maupun program kerja jangka panjang.

Program UNAIDS di Jakarta yang sejalan dengan prinsip-prinsip STRANAS, yakni berupa program advokasi untuk kalangan remaja di Jakarta khusunya yang berusia 15-24 tahun. Dan program melalui media massa yang fungsinya disini adalah untuk menjangkau semua kalangan, khususnya adanya iklan layanan masyarakat mengenai bahayanya HIV/AIDS dan promosi penggunaan kondom. Dan program pemberdayaan orang yang sudah terinfeksi virus HIV/AIDS (ODHA) yang memerlukan penanganan khusus untuk mencegah kemungkinan penularan kepada orang lain. Kelompok resiko tinggi juga merupakan hal yang menjadi salah satu program pencegahan HIV di Jakarta dan program pencegahan virus HIV/AIDS dari ibu ke anak. (http://www.unaids.org/partnership/index.html.Pdf, diakses pada tanggal 25 Mei 2010).

Program-program tersebut diharapkan mampu untuk mengurangi atau menekan tingkat penyebaran virus HIV/AIDS di Jakarta, program advokasi pada kalangan remaja adalah hal yang relevan dengan perkembangan virus HIV/AIDS dikarenakan para kalangan remaja sangatlah rentan virus ini. Dengan adanya penyuluhan terhadap kalangan remaja atau kampanye-kampanye bahayanya HIV/AIDS akan menekan penyebaran virus ini. ODHA adalah orang yang hidup dengan HIV/AIDS, yang seharusnya dapat perawatan dan dukungan dari semua pihak justru mendapatkan stigma dan diskriminasi. Dengan begitu, para ODHA diharapkan mendapatkan hak-hak yang berkemanusiaan setara dengan orang-orang biasa, seperti hak kesehatan dan pendidikan.

Program untuk kelompok resiko tinggi merupakan hal yang juga ditakuti menyebarluaskan virus HIV/AIDS ini, dikarenakan para kelompok resiko tinggi ini mencakup pekerja seks dan pemakai narkoba suntik yang sangat besar terkontaminasi virus HIV/AIDS pada pelanggannya, maka dengan begitu diharapkan para pekerja seks dapat melakukan tindakan kondominasi 100% yang dikeluarkan oleh kebijakan UNAIDS, meskipun program ini masih kontroversial di Indonesia umumnya. Dan untuk kelompok resiko tinggi lainnya, seperti halnya pemakai narkoba suntik, UNAIDS sendiri memberlakukan konsep *Harm Reduction* untuk kelompok resiko tinggi, yakni untuk pemakai narkoba suntik. Konsep *Harm Reduction* sendiri merupakan konsep yang pertama kali diadakan di Indonesia pada tahun 1999, akan tetapi *Harm Reduction* ini bertentangan dengan hukum Indonesia, karena UNAIDS menilai program pengurangan dampak buruk penyalahgunaan narkoba suntik yang terkait HIV/AIDS ini sebagai masalah kesehatan publik, bukan menilai pengguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang ditetapkan pemerintah Indonesia UU No 5 Tahun 1997 dan UU No 22 Tahun 1997 yang menyebutkan, penggunaan narkoba adalah tindakan melanggar hukum. Indonesia, sebagai salah satu anggota PBB, tentunya harus menghormati kebijakan yang telah disepakati. Hanya seharusnya kebijakan *Harm Reduction* tersebut tentunya juga harus mengkontekstualisasikan dengan nilai atau norma yang berlaku di bangsa Indonesia sehingga kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan selalu melihat kepentingan manusia yang harus berujung pada berubahnya perilaku manusia itu (pecandu).

(http://en.wikipedia.org/wiki/Harm_Reduction, diakses pada tanggal 08 April 2010).

Dan adanya program lain dalam menekan penyebaran virus HIV/AIDS, adalah adanya program Layanan konseling dan tes sukarela atau program layanan *Voluntary Counseling and Testing* (VCT) ini dimaksudkan membantu masyarakat terutama para ibu yang sedang mengandung dan takut anaknya akan terindikasi virus HIV/AIDS, maka dengan adanya program tersebut diharapkan para semua kalangan termasuk para ibu dapat memeriksakan dirinya dengan sukarela dan program ini juga merupakan hal yang signifikan untuk mengurangi penyebaran virus HIV/AIDS pada anak. Karena anak adalah generasi bangsa yang seharusnya dapat mengangkat nilai bangsa ini.

Layanan Konseling dan Testing Sukarela atau VCT adalah program pencegahan sekaligus jembatan untuk mengakses layanan CST (perawatan, dukungan dan pengobatan bagi ODHA). Layanan VCT harus mencakup konseling pre-tes, tes HIV, dan konseling post tes. Kegiatan tes dan hasil tes pasien harus dijalankan atas dasar prinsip kesukarelaan dan kerahasiaan.

Pada tahun 2001, Majelis Umum PBB mempertimbangkan isu-isu HIV/AIDS dan pada *UN General Assembly Special Session on HIV/AIDS* (UNGASS) *Declaration of Commitment* yang ditandatangani oleh perwakilan dari 189 negara, menyatakan bahwa negara-negara penandatangan harus membuat mekanisme monitoring dan evaluasi yang memadai untuk mengukur dan menilai kemajuan pelaksanaan komitmen, serta membuat instrument monitoring dan evaluasi serta menyediakan data epidemiologik yang memadai.

Pertemuan itu merupakan tonggak utama dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS. Diakui bahwa epidemi HIV/AIDS telah menyebabkan penderitaan dan kematian di seluruh dunia tak terhitung. Sidang Khusus PBB juga bertugas untuk meningkatkan dunia bahwa masih ada harapan. Dengan akan cukup dan sumber daya, masyarakat dan negara bisa mengubah program studi epidemik yang mematikan. Tema krisis global memerlukan aksi global berfungsi untuk menegaskan perlunya perhatian segera. (http://www.unaids.org/en/, diakses pada tanggal 15 April 2010).

UNAIDS adalah badan PBB yang berbasis di Jenewa, sekretariat UNAIDS bekerja pada lebih 75 Negara. Dan didirikan pada tahun 1994 oleh Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial yang diluncurkan pada bulan Januari 1996. Melalui serangkaian tujuan, Resolusi dan Deklarasi yang diadopsi oleh negara-negara anggota PBB, dunia memiliki seperangkat komitmen, tindakan dan tujuan untuk menghentikan dan membalikkan penyebaran HIV dan skala ke arah akses universal untuk pencegahan HIV, pengobatan, perawatan dan dukungan layanan.

Dan Pada tahun 2006 sebuah Deklarasi kembali tentang HIV/AIDS secara bulat diadopsi oleh negara-negara anggota PBB pada akhir dari Majelis Umum PBB 2006 Pertemuan Tingkat Tinggi tentang HIV/AIDS. Ini memberikan mandat yang kuat untuk membantu bergerak ke depan penanggulangan HIV/AIDS, dengan skala kearah akses universal untuk pencegahan HIV/AIDS, pengobatan, perawatan dan dukungan. Hal ini juga menegaskan kembali tahun 2001 Deklarasi Komitmen dan *Millenium Development Goals*, khususnya tujuan untuk menghentikan dan mulai membalikkan penyebaran HIV/AIDS pada tahun 2015.

(http://www.unaids.org/en/AboutUNAIDS/Goals/default.asp, diakses pada tanggal 15 April 2010).

Dua masalah besar yang menjadi masalah global dan meningkat secara cepat dan signifikan lonjakannya di Asia, termasuk Indonesia, adalah penularan HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba. Kedua epidemi ini memerlukan inisiasi, inisiatif dan gerakan yang memerlukan komitmen politik, sumber daya, multidimensi, multi sektor serta lembaga yang terorganisasi secara bersama-sama. Keseriusan komitmen harus dengan kerja nyata, yang terintegrasi mulai dari assessmen awal, perencanaan strategi, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi oleh semua pihak, pemerintah, LSM, swasta, tokoh apapun di masyarakat dengan budayanya dan caranya, lembaga keilmuan dan profesi lainnya.

Dengan pembahasan mengenai Peranan *United Nations Joint Program on HIV/AIDS (*UNAIDS*)* dalam mengurangi penyebaran virus HIV/AIDS di DKI Jakarta, Indonesia. Menimbulkan ketertarikan penulis untuk meneliti bagaimana Peranan UNAIDS dalam mengurangi penyebaran virus HIV/AIDS di DKI Jakarta Indonesia, yang akan diberi judul :

"Peranan *United Nations Joint Program on HIV/AIDS (*UNAIDS*)* dalam mengurangi penyebaran virus HIV/AIDS di DKI Jakarta Indonesia"

Selanjutnya penelitian ini akan berhubungan dengan beberapa mata kuliah pada studi hubungan internasional, yaitu :

1. Organisasi dan Administrasi Internasional

   Mata kuliah ini membantu menjelaskan proses dan fungsi keorganisasian yang ada pada Badan PBB, yakni UNAIDS dalam menjalankan tugasnya.

2. Pengantar Hubungan Internasional

   Membahas tentang bagaimana bentuk-bentuk interaksi antar negara dan aktor non-negara.

3. Isu-isu Global

   Mata kuliah ini membahas tentang isu-isu apa saja yang menjadi wacana Internasional atau perbincangan masyarakat dunia, seperti isu lingkungan hidup, terorisme, gender, dan sosial.

1.2 Identifikasi Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka peneliti mengajukan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Program apakah yang dilakukan UNAIDS dalam mengurangi penyebaran virus HIV/AIDS di Jakarta?
2. Kendala apakah yang dihadapi oleh UNAIDS dalam mengurangi penyebaran virus HIV/AIDS di Jakarta?
3. Apakah upaya yang dilakukan UNAIDS dalam menghadapi kendala mengurangi penyebaran virus HIV/AIDS di Jakarta?
4. Bagaimana keberhasilan UNAIDS dalam mengurangi penyebaran virus HIV/AIDS di Jakarta?

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah merupakan upaya untuk menetapkan batas-batas permasalahan dengan jelas, yang memungkinkan kita untuk mengidentifisikan faktor mana saja yang termasuk ke dalam lingkup permasalahan dan faktor mana saja yang tidak. (Suriasumantri, 2001:311). Dalam penelitian ini penulis membatasi kajian mengenai peranan *United Nations Joint Program on HIV/AIDS* (UNAIDS) dalam mengurangi penyebaran virus HIV/AIDS di DKI Jakarta 2003-2006. Karena pada tahun 2003 dimana enam provinsi di Indonesia, termasuk di Jakarta memasuki tahap yang mengkhawatirkan dengan epidemi HIV/AIDS nya. Dan tahun 2006, lonjakan penyebaran virus HIV/AIDS di Jakarta naik drastis hanya dalam rentan waktu tiga bulan di tahun 2006.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan pada latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dibahas, maka peneliti dapat merumuskan garis besar permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

"Bagaimanakah peranan *United Nations Joint Program on HIV/AIDS* (UNAIDS) dalam mengurangi penyebaran virus HIV/AIDS di DKI Jakarta?"

1.5 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentu mempunyai tujuan tertentu berdasarkan pada kepentingan serta motif-motif individual maupun kolektif. Tujuan penelitian berkaitan dengan penelaahan, pemahaman serta pengembangan bidang yang

sedang diteliti, dengan demikian tujuan merupakan aplikasi bagi dilaksanakannya suatu penelitian, adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui program-program yang dilaksanakan UNAIDS dalam mengurangi penyebaran virus HIV/AIDS di Jakarta
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi UNAIDS dalam mengurangi penyebaran virus HIV/AIDS di DKI Jakarta
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan UNAIDS dalam menghadapi kendala dalam mengurangi penyebaran virus HIV/AIDS di Jakarta
4. Untuk mengetahui bagaimana hasil kerja dari UNAIDS di Jakarta

1.5.2 Kegunaan Penelitian

1.5.2.1 Kegunaan Teoritis

a. Untuk mengetahui peranan IGO khususnya UNAIDS dalam mengurangi penyebaran virus HIV/AIDS di Jakarta
b. Sebagai sebuah pengaplikasian ilmu yang telah diperoleh untuk menambah ketajaman dalam menganalisa suatu permasalahan berdasarkan teori-teori empiris.

1.5.2.2 Kegunaan Praktis

a. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Strata 1 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Komputer Indonesia Prodi Ilmu Hubungan Internasional.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan tambahan informasi dan pembelajaran serta penstudi ilmu Hubungan Internasional

lainnya yang tertarik untuk membahas masalah UNAIDS dengan topik penelitian yang dibahas kali ini.

1.6 Kerangka Teoritis, Hipotesis, dan Definisi Operasional

1.6.1 Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya Hubungan Internasional merupakan interaksi antar aktor suatu negara dengan negara lainnya. Pada kenyataannya Hubungan Internasional tidak terbatas hanya pada hubungan antar negara saja, tetapi juga merupakan hubungan antar individu dengan kelompok kepentingan, sehingga negara tidak selalu sebagai aktor utama tetapi merupakan aktor yang rasional yang dapat melakukan hubungan melewati batas negara.

Hubungan Internasional menurut Evans Graham dan Jeffney Newham dalam bukunya *The Dictionary Of World Politics* mengartikan Hubungan Internasional sebagai berikut :

> "Hubungan Internasional merupakan suatu istilah yang digunakan untuk melihat seluruh interaksi antara aktor-aktor negara dengan melewati batas-batas negara". (1990: 6)

Hubungan kerjasama antara KPA dengan UNAIDS salah satu contoh dari sekian banyak fenomena yang terjadi dalam hubungan internasional, aktor hubungan internasional bisa saja merupakan aktor negara atau juga aktor non-negara, seperti yang diungkapkan oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* :

> "Hubungan Internasional didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu". (2005: 4).

Dengan kecenderungan terjadinya perubahan dalam isu Hubungan Internasional, jelaslah bahwa akan terjadi juga perubahan pada para pelaku dalam Hubungan Internasional yang sering kita sebut sebagai aktor. Aktor tidak hanya berkutat pada *state actor* saja, tetapi juga semakin berkembangnya, baik jumlah maupun pengaruh, *non-state actor*. Sebuah keadaan yang sangat sesuai dengan paradigma pluralis. Namun tetap saja *state actor* masih menjadi aktor yang dominan dalam Hubungan Internasional. Secara sederhana penulis dapat menyimpulkan bahwa Hubungan Internasional adalah segala bentuk interaksi antar *state actor* maupun *non-state actor*. Artinya Hubungan Internasional saat ini semakin kompleks saja, tidak hanya didominasi oleh para aktor negara tetapi juga oleh aktor non-negara.

Ketika kita membicarakan pola hubungan kerjasama, tidak dapat dipungkiri bahwa negara membutuhkan alat yang diperlukan dalam rangka kerjasama dan mencari kompromi untuk menentukan kesejahteraan dan memecahkan persoalan bersama serta mengurangi pertikaian yang timbul yaitu Organisasi Internasional.

Berkaitan dengan organisasi internasional, telah banyak definisi mengenai salah satu aktor hubungan internasional ini.

> Organisasi Internasional, adalah pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda. (Rudi, 2005: 3).

Suatu kerjasama internasional dapat dikategorikan sebagai organisasi internasional jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Kerjasama yang ruang lingkupnya melintasi batas negara.
- Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama.
- Baik antar pemerintah maupun non pemerintah.
- Struktur organisasi yang jelas dan lengkap.
- Melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan.(Rudi, 2005: 4).

Organisasi internasional ini muncul untuk memenuhi tuntutan keinginan untuk meningkatkan dan melembagakan kerjasama internasional secara permanen dalam kaitannya dengan usaha bersama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Didirikannya organisasi internasional adalah selain untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan lebih tertib dalam upaya mencapai tujuan bersama, juga sebagai suatu wadah hubungan kerjasama antar organisasi dengan organisasi lainnya agar kepentingan masing-masing organisasi dapat terjamin dan terpenuhi.

Oleh karena itu, UNAIDS sebagai organisasi internasional berintegrasi dengan negara-negara, termasuk dengan Indonesia melalui KPA ataupun lembaga-lembaga yang terkait dengan permasalahan virus HIV/AIDS, dengan

tujuan menanggulangi penyebaran virus HIV/AIDS secara komprehensif pada level nasional.

Paradigma merupakan pijakan dasar untuk menjelaskan fenomena-fenomena, masalah-masalah Hubungan Internasional atau politik tertentu melalui sistem kriteria, standar-standar, prosedur-prosedur dan seleksi fakta permasalahan yang relevan (Perwita dan Yani, 2005:24).

Pengertian paradigma pluralis adalah sebagai berikut:

> "Merupakan salah satu perspektif yang berkembang pesat. Kaum Pluralis memandang Hubungan Internasional tidak hanya terbatas pada hubungan antar negara saja, tetapi juga merupakan hubungan antara individu dan kelompok kepentingan dimana negara tidak selalu sebagai aktor utama dan aktor tunggal" (Perwita dan Yani, 2005:26).

Paradigma pluralis memberikan 4 asumsi, yaitu:

1 Aktor non-negara memiliki peranan penting dalam Politik Internasional seperti Organisasi Internasional, baik pemerintah maupun non-pemerintah, *Multi National Corporations* (MNCs), kelompok atau individu.

2 Negara bukanlah aktor tunggal, karena aktor-aktor lain selain negara juga memiliki peran yang sama pentingnya dengan negara dan menjadikan negara bukan satu-satunya aktor.

3 Negara bukanlah aktor rasional. Dalam kenyataannya pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara merupakan proses yang diwarnai konflik, kompetisi dan kompromi antar aktor di dalam negara.

4 Masalah-masalah yang ada tidak lagi terpaksa pada *power* atau *national security*, tetapi meluas pada masalah-masalah sosial, ekonomi dan lain-lain. (Viotti dan Kauppi, 1990:1992-1993).

Bagi kaum Pluralis, interdependensi memiliki implikasi yang baik terhadap aktor-aktor Hubungan Internasional. Pluralis melihat bahwa kesempatan untuk membangun sebuah hubungan baik antara unit-unit yang interdependen sangat bagus. Mengelola hubungan interdependen meliputi pembuatan seperangkat aturan, prosedur dan institusi yang terasosiasi atau Organisasi Internasional untuk mengatur interaksi dalam area-area isu. Namun demikian, negara tetap memiliki tempat tersendiri sebagai aktor Hubungan Internasional dimana negara merupakan kelompok yang mewakili dan meliputi anggota-anggota dengan refleksi yang berbeda-beda dan perlu berhubungan dengan pihak lain demi pencapaian kepentingan nasionalnya. Negara merupakan suatu unit politik yang didefinisikan menurut teritorial, populasi dan otonomi pemerintah yang secara efektif mengontrol wilayah dan penghuninya tanpa menghiraukan homogenitas etnis (Coulombis dan Wolfe, 1999:66).

Kerjasama internasional merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu dengan yang lain. Dalam melakukan kerjasama ini dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan kerjasama tersebut. tujuan dari kerjasama ini ditentukan oleh persamaan kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan (Perwita,Yani, 2005: 34).

Peranan merupakan aspek dinamis. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2001:268).

Peranan (*role*) dapat dikatakan sebagai berikut:

> "Seperangkat perilaku yang diharapkan dari seorang atau struktur tertentu yang menduduki suatu posisi didalam suatu sistem. Suatu organisasi memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah di sepakati bersama. Apabila struktur-struktur tersebut telah menjalankan fungsi-fungsinya, maka organisasi itu telah menjalankan peranan tertentu. Dengan demikian, peranan dianggap sebagai fungsi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan kemasyarakatan" (Kantaprawira, 1987:32).

Pengertian lain dari peranan adalah sebagai berikut:

> "Perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Ini adalah perilaku yang dilekatkan pada posisi tersebut, diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi tertentu" (Mas'oed, 1994:44).

Konsep peranan ini pada dasarnya berhubungan dan harus dibedakan dengan konsep posisi sosial. Posisi ini merupakan elemen dari organisasi. Sedangkan peranan adalah aspek fisiologis organisasi yang meliputi fungsi, adaptasi dan proses.

Peranan juga dapat diartikan sebagai berikut:

> "Tuntunan yang diberikan secara struktural (norma, harapan, larangan dan tanggung jawab), dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan, membimbing dan mendukung fungsinya dalam organisasi" (Coser dan Rosenberg, 1976:232-255).

Peranan organisasi internasional erat kaitannya dengan aktivitas organisasi yang dipahami sebagai fungsi dan status, kedudukan atau fungsi organisasi internasional didalam sistem global, dimana aktivitas-aktivitas ini dianggap

sebagai hal yang menunjukan peranannya. Peranan diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara stuktural dalam konsep tanggung jawab dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan dan mendukung fungsinya sebagai sebuah organisasi.

Peranan Organisasi Internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

1 Sebagai instrumen. Organisasi Internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.

2 Sebagai arena. Organisasi Internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota saja untuk membicarakan dan membahas masalah dalam negeri lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional.

3 Sebagai aktor independen. Organisasi Internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi (Perwita dan Yani, 2005 : 95).

Selanjutnya Archer (1983:152-169) mengemukakan adanya Sembilan fungsi Organisasi Internasional, yaitu sebagai berikut:

1. Artikulasi dan agregasi kepentingan nasional negara-negara anggota.
2. Menghasilkan norma-norma
3. Rekrutmen
4. Sosialisasi
5. Pembuatan keputusan
6. Penerapan keputusan
7. Penilaian/penyelerasan keputusan

8. Tempat memperoleh informasi
9. Operasionalisasi, antara lain pelayanan teknis, penyedia bantuan.(Rudi,2005:29).

Agenda internasional saat ini tidak hanya mengenai isu-isu keamanan militer saja tapi juga menyangkut sosial, ekonomi, HAM, kesejahteraan, lingkungan hidup hingga isu kesehatan.

Pengertian HIV/AIDS menurut Kleden dalam bukunya AIDS fenomena abad 20, bahwa:

> "HIV merupakan suatu virus yang menyebabkan menurunnya atau rusaknya system kekebalan tubuh manusia bertugas untuk melindungi tubuh terhadap serangan infeksi yang masuk ke dalam tubuh. Tetapi bila di dalam tubuh kita telah terinfeksi HIV maka seseorang otomatis kekebalan tubuhnya akan dirusak oleh HIV sehingga kemampuan tubuhnya untuk mencegah infeksi yang masuk menjadi menurun, tubuh akibatnya tidak sanggup lagi menahan berbagai penyakit, walaupun penyakit yang tidak berbahaya sekalipun". (Kleden,1993:1).

HIV adalah suatu virus yang dapat menyebabkan AIDS, dan AIDS menurut Kleden adalah:

> "AIDS merupakan sebutan bagi kumpulan gejala yang muncul karena berkurangnya kekebalan tubuh akibat terserang HIV. Seseorang HIV, positif dinyatakan AIDS apabila: (1) Hasil tes HIV adalah positif dan (2) menderita salah satu atau lebih penyakit infeksi oportunistik khusus yang kambuh berulang kali atau menunjukkan adanya gangguan yang parah pada sistem kekebalan tubuhnya. Jadi seseorang yang telah dinyatakan menderita HIV positif belum tentu pada stadium AIDS, tetapi orang yang sudah pada stadium AIDS dapat dipastikan mengidap HIV positif" (Kleden,1993:1)

Penyebaran Virus HIV/AIDS sudah merupakan hal yang kompleks secara global, pengaruh virus ini tentunya akan berdampak hingga berbagai aspek kehidupan. Dalam bidang ekonomi, negara akan kehilangan SDM yang produktif hingga akan menurunkan pendapatan masyarakat. Di bidang sosial, termasuk

disintegrasi sosial. Bila di bidang kesehatan, negara akan banyak mengeluarkan biaya besar untuk pengobatan para penderita HIV/AIDS. Virus ini juga menjadikan dampak negative terhadap penderita HIV/AIDS, atau akan terjadinya diskriminasi sosial.

Jadi, HIV/AIDS tidak hanya merusak terhadap kesehatan, melainkan membawa efek tidak langsung terhadap berbagai bidang kehidupan, terutama pada bidang ekonomi dan bidang sosial. Sebagai badan Internasional, UNAIDS berintegrasi dengan negara-negara yang terkontaminasi virus HIV/AIDS. UNAIDS membantu negara-negara untuk bantuan penyusunan dan pelaksanaan program-program kerjasama yang dianggap mampu memberikan hasil yang lebih efektif dalam penanggulangan HIV/AIDS. Memimpin, memperkuat dan mendukung respon yang meluas terhadap HIV dan AIDS yang termasuk mencegah transmisi HIV, menyediakan fasilitas dan dukungan untuk orang yang sudah terlanjur hidup dengan virus HIV dan mengurangi dampak epidemik virus HIV/AIDS adalah misi dari UNAIDS yang diterapkan oleh seluruh negara, terutama negara berkembang seperti Indonesia.

1.6.2 Hipotesis

Berdasarkan uraian sebelumnya dan guna memudahkan dalam memberikan gambaran bagi peneliti terhadap penelitian yang dilakukan, peneliti menarik sebuah hipotesis sebagai berikut :

"UNAIDS berperan mengurangi penyebaran virus HIV/AIDS di Jakarta melalui program advokasi di kalangan remaja, program media massa, program perawatan serta dukungan untuk ODHA, program kelompok resiko tinggi dan program pencegahan virus HIV/AIDS dari ibu ke anak"

1.6.3 Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. (Nazir, 1988 : 152).

Definisi operasional merupakan serangkaian prosedur yang mendeskripsikan kegiatan yang harus dilakukan kalau kita hendak mengetahui eksitensi empiris atau derajat eksistensi suatu konsep. Melalui definisi seperti itu, makna suatu konsep dijabarkan. Dengan demikian definisi operasional merupakan jembatan antara tingkat konseptual teoritis dengan tingkat observasional-empiris. Definisi ini mengatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diamati untuk membawa fenomena yang didefinisikan itu kedalam jangkauan pengalaman peneliti yang bersangkutan. (Masoed, 1994 : 100).

Untuk mempermudah pengkajian lebih lanjut, penulis mengajukan definisi operasional yang terdapat dalam hipotesis yaitu :

1. UNAIDS adalah badan PBB yang berbasis di Jenewa, *secretariat* UNAIDS bekerja pada lebih 75 negara. Dan didirikan pada tahun 1994 oleh resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial yang diluncurkan pada bulan Januari 1996. Melalui serangkaian tujuan, Resolusi dan Deklarasi yand diadopsi oleh negara-negara anggota PBB, dunia memiliki seperangkat komitmen, tindakan dan tujuan untuk menghentikan dan membalikkan penyebaran HIV dan skala ke arah akses universal untuk pencegahan HIV, pengobatan, perawatan dan dukungan layanan.
2. HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus yang dapat menyebabkan AIDS dengan cara menyerang sel darah putih yang bernama sel CD4 sehingga dapat merusak system kekebalan tuuh manusia yang pada akhirnya tidak dapat bertahan dari gangguan penyakit walaupun yang sangat ringan sekalipun.
3. Mengurangi penyebaran virus HIV/AIDS dengan beberapa program yang menjadi mandat UNAIDS, dengan menerapkan program-programnya melalui lembaga-lembaga terkait virus HIV/AIDS di Jakarta. Salah satunya melalui KPA Nasional di Jakarta, dan Program UNAIDS di Jakarta itu sendiri sejalan dengan prinsip-prinsip STRANAS, yakni berupa program advokasi untuk kalangan remaja di Jakarta khususnya yang berusia 15-24 tahun. Dan program melalui media massa yang fungsinya disini adalah untuk menjangkau semua kalangan, khususnya adanya iklan layanan masyarakat mengenai bahayanya HIV/AIDS dan promosi penggunaan kondom. Dan program

pemberdayaan orang yang sudah terinfeksi virus HIV/AIDS (ODHA) yang memerlukan penanganan khusus untuk mencegah kemungkinan penularan kepada orang lain. Kelompok resiko tinggi juga merupakan hal yang menjadi salah satu program pencegahan HIV di Jakarta dan program pencegahan virus HIV/AIDS dari ibu ke anak.

1.7 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.7.1 Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian diperlukan metode untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan guna melakukan kajian terhadap masalah yang akan diteliti. Untuk melakukan penelitian ini metode yang digunakan adalah :

Metode Deskriptif Analitis : Metode ini memberikan suatu gambaran tentang masalah yang akan diteliti berdasarkan situasi dan keadaan tertentu dimana data yang diperoleh nantinya akan dikumpulkan, disusun, dijelaskan, kemudiaan dianalisa sehingga nantinya gambaran yang dibuat akan menjadikan data tersebut tersusun secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data-data dengan menggunakan teknik studi kepustakaan *(Library Research)* atau dokumentasi, di mana informasi yang didapat berdasarkan penelaahan literatur dan referansi dari berbagai data sekunder yang bersumber dari buku-buku, media massa, artikel,

dokuman dan laporan yang berupa jurnal atau hasil catatan penting lainnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

1.8 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

1.8.1 Lokasi Penelitian

Tempat yang digunakan untuk penelitian adalah :

1. Kantor Sekretariat PBB, Jakarta.
2. Kantor Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, Jakarta
3. Pepustakaan Universitas Komputer Indonesia

   Jl. DipatiUkur No. 112 Bandung.
4. Perpustakaan Universitas Pasundan Bandung

   Jl. Lengkong Besar No. 69 Bandung.
5. Perpustakaan Universitas Padjajaran, Jatinangor

   Jl. Raya Bandung Sumedang

1.8.2 Waktu Penelitian

Tabel 1.1

Jadwal Kegiatan Penelitian

Januari – Agustus

2010

No	Aktivitas	Tahun 2010							
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust
1	Pengajuan Judul								
2	Pembuatan usulan Penelitian								
3	Seminar Usulan Penelitian								
4	Bimbingan Skripsi								
5	Pengumpulan Data								
6	Pengolahan Data								
7	Rencana Sidang								

1.9 Sistematika Pembahasan

Peneliti mencoba menjabarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, pada bab ini peneliti memaparkan latar belakang mengapa mengambil masalah ini untuk layak diangkat sebagai sebuah masalah yang perlu diteliti sebagai sebuah karya ilmiah, dimana dalam bab ini terkandung unsur-unsur seperti latar belakang penelitian, identifikasi masalah yang meliputi pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, hipotesis penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, lokasi dan lamanya penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, berisi penjelasan teori – teori dan konsep – konsep yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

BAB III Objek Penelitian, bab ini memberikan gambaran umum mengenai objek penelitian, yang berkaitan dengan judul skripsi penelitian atau permasalahan yang diteliti. Seperti menjelaskan gambaran umum mengenai UNAIDS dan virus HIV/AIDS.

BAB IV Dalam bab ini dilaporkan hasil penelitian yang diperoleh selama penelitian serta membandingkan hasil yang diperoleh dengan data pengetahuan yang telah dipublikasikan serta menjelaskannya implikasi data tersebut dengan ilmu pengetahuan.

BAB V Pada bab ini penulis membahas tentang kesimpulan dan saran-saran hasil dari pembahasan (BAB IV). Kesimpulan ditulis dalam bentuk rangkuman singkat tapi jelas dan informatif. Pada bagian akhir ditulis suatu penegasan bahwa hipotesis penelitian diterima atau ditolak.